



MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEMUDA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF IMPLEMENTASI PROGRAM OKP DI KABUPATEN LEBAK

Suparta¹, Setiaji Anggun²

Universitas Setiabudhi Rangkasbitung, Banten, Indonesia^{1,2}

suparrta12@gmail.com^{1*}, setiajianggun40@gmail.com²

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Youth Empowerment; Policy Implementation; Organizational.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of youth development programs through Youth Community Organizations (OKP) in Lebak Regency. The research identifies key barriers, including poor communication and coordination between local government and OKPs, as well as internal conflicts within the local branch of the Indonesian National Youth Committee (KNPI). The findings show that limited resources, both financial and human, hinder the successful implementation of youth empowerment policies. To improve program effectiveness, the study recommends enhancing communication, strengthening organizational capacity, and resolving leadership conflicts within KNPI. The use of digital platforms for better coordination and transparency in program execution is also proposed. These findings contribute to the understanding of public policy implementation at the local level and offer practical recommendations for improving youth development initiatives in the region.

Korespondensi:

suparrta12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan pemuda melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Lebak. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama, termasuk komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah daerah dan OKP, serta konflik internal dalam KNPI setempat. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda. Untuk meningkatkan efektivitas program, penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi, penguatan kapasitas organisasi, dan penyelesaian konflik kepemimpinan dalam KNPI. Penggunaan platform digital untuk koordinasi dan transparansi program juga diusulkan. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman implementasi kebijakan publik di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki inisiatif pembinaan pemuda di daerah tersebut.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Suparta, & Anggun, S. (2025). Meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda melalui kebijakan publik: Perspektif implementasi program OKP di Kabupaten Lebak. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 45–54.

PENDAHULUAN

Pembinaan pemuda melalui kebijakan publik memainkan peran vital dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan potensi generasi muda untuk menjadi pemimpin yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing. Di Indonesia, kebijakan tentang pembinaan pemuda telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kebijakan ini menekankan pentingnya melibatkan pemuda dalam setiap dimensi pembangunan melalui pembinaan yang terstruktur, seperti yang diatur dalam berbagai program Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan sosial pemuda, yang diharapkan dapat meningkatkan peran mereka dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Menurut Ivancevich (2008), pembinaan merupakan sebuah proses yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi juga dengan pembentukan karakter dan kepemimpinan yang mumpuni. Sementara itu, menurut Wicaksana dkk. (2020), kebijakan publik yang berorientasi pada pembinaan pemuda harus mampu mengakomodasi dinamika sosial dan politik yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, peran organisasi seperti KNPI dan OKP menjadi sangat penting, karena mereka merupakan saluran utama untuk membina pemuda dan menyiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Pembinaan yang efektif tidak hanya membekali pemuda dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan kesadaran sosial dan politik yang akan memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat.

Namun, meskipun kebijakan ini memiliki dasar yang kuat, implementasi pembinaan pemuda di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama

adalah ketidakmaksimalan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan pemuda. Sebagai contoh, di Kabupaten Lebak, program pembinaan yang diusung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) belum dapat berjalan secara optimal, terutama karena minimnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi terkait dan organisasi pemuda. Hal ini berakibat pada kurangnya pemahaman dari organisasi tentang program-program yang tersedia, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan. Menurut penelitian oleh Sulistyono (2019), koordinasi yang buruk antara pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik. Di sisi lain, data yang tersedia juga menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan pemuda sering kali tidak digunakan secara efisien, karena terbatasnya akses informasi dan dukungan yang diberikan kepada pengurus OKP. Selain itu, adanya dualisme dalam kepemimpinan KNPI di Kabupaten Lebak juga memperburuk masalah ini. Penelitian oleh Wicaksana dkk. (2020) mengungkapkan bahwa ketidakstabilan organisasi dalam struktur kepemimpinan dapat memperburuk efektivitas implementasi kebijakan publik, karena menyebabkan fragmentasi dalam pengelolaan program. Oleh karena itu, masalah komunikasi, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran perlu diatasi untuk memastikan bahwa pembinaan pemuda dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang maksimal.

Artikel ini menawarkan alternatif solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah pengenalan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih

terstruktur, yang dapat memastikan bahwa setiap program pembinaan pemuda dapat dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini akan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses koordinasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam hal ini, penggunaan platform digital yang dapat menghubungkan pemerintah, organisasi pemuda, dan masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif, seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan (2018). Teknologi dapat mempercepat aliran informasi antara pihak-pihak terkait, sehingga meminimalkan miskomunikasi dan ketidakpahaman mengenai tujuan dan sasaran program. Selain itu, dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan, program pembinaan pemuda diharapkan dapat lebih terarah dan berkelanjutan. Pemberdayaan organisasi dengan pelatihan manajerial dan keuangan dapat memperbaiki sistem pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan pemuda dalam hal pengelolaan anggaran dan akuntabilitas publik telah terbukti efektif di beberapa negara berkembang lainnya (Nugroho, 2021). Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan OKP dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan lokal serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan sosial masyarakat di Kabupaten Lebak.

Urgensi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada pencarian solusi atas masalah yang ada, tetapi juga dalam memberikan kontribusi praktis terhadap perbaikan kebijakan publik di tingkat daerah. Dalam konteks Kabupaten Lebak, penelitian ini akan menjadi acuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat efektivitas program pembinaan pemuda, serta memberikan

rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti dan data yang ada. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan solusi teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam konteks lokal. Keunikan riset ini terletak pada pendekatan kebijakan publik berbasis teknologi digital dan penguatan kapasitas organisasi yang diusulkan, yang masih jarang diterapkan dalam konteks kebijakan pembinaan pemuda di Indonesia. Penelitian oleh Agustino (2020) dan Mulyana (2019) juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas program pemerintah. Riset ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pembinaan pemuda dapat dioptimalkan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan masyarakat, serta bagaimana pendekatan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan pemuda melalui kebijakan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan yang sesuai. Implementasi kebijakan untuk pembinaan pemuda sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi antara aktor kebijakan, sumber daya yang tersedia, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Menurut Wicaksana dkk. (2020), kebijakan pembinaan pemuda di Indonesia, khususnya melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), memiliki potensi besar dalam membentuk kepemimpinan dan karakter

pemuda, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi pemuda itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program yang ada (Nugroho, 2021).

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) menjadi dasar utama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pembinaan pemuda. Edwards mengidentifikasi empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pembinaan pemuda di Kabupaten Lebak, faktor komunikasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan OKP sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang dapat dijalankan dengan efektif. Sumber daya, baik berupa anggaran maupun tenaga kerja, juga merupakan elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya alokasi sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan yang signifikan (Agustino, 2020; Mulyana, 2019). Selain itu, disposisi pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang efisien menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik (Nakamura & Smallwood, 2017).

Evaluasi kebijakan pembinaan pemuda di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kebijakan yang dirumuskan, implementasinya belum optimal. Sulisty (2019) mengemukakan bahwa evaluasi terhadap kebijakan publik yang menyangkut pemuda sering kali tidak memperhatikan aspek-aspek penting, seperti keterlibatan langsung pemuda dalam perencanaan program dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. Penelitian oleh Kurniawan (2018)

juga menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan organisasi pemuda menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan aktor-aktor pemuda dan masyarakat untuk memberikan feedback yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan temuan dari Miftah (2020) yang menyarankan agar kebijakan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan riil pemuda dan komunitasnya.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memiliki peran penting dalam membina pemuda agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Wicaksana dkk. (2020) menekankan bahwa OKP adalah wadah yang ideal untuk melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Namun, di Kabupaten Lebak, peran OKP dalam program pembinaan pemuda belum sepenuhnya maksimal, akibat dari konflik internal dalam organisasi seperti KNPI. Menurut Rizal (2021), konflik internal dalam OKP menghambat pelaksanaan program pembinaan, yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pemuda. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan manajemen dalam OKP sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah pengembangan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pemuda, termasuk kewirausahaan dan kepemimpinan, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2019; Thoha, 2001).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembinaan pemuda, beberapa strategi perlu diterapkan. Salah satunya adalah dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, OKP, dan masyarakat. Kurniawan (2018) berargumen bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak dalam

implementasi kebijakan publik. Selain itu, peningkatan kapasitas OKP dalam hal manajemen organisasi dan keuangan juga sangat penting agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program pembinaan. Agustino (2020) menyarankan bahwa penggunaan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program pembinaan dan memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pembinaan pemuda melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Lebak. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan (Mulyana, 2019). Kehadiran peneliti sangat krusial dalam penelitian ini, karena peneliti terlibat langsung dalam wawancara dan observasi, memastikan data yang diperoleh mencerminkan realitas di lapangan (Nugroho, 2021). Peneliti memilih informan secara purposive sampling yang terdiri dari pejabat Dinas Kepemudaan dan Olahraga, pengurus OKP, serta anggota OKP yang terlibat dalam program pembinaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lebak selama tiga bulan (Januari hingga Maret 2025). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan (Wicaksana, 2020). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam implementasi kebijakan (Edwards, 1980). Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi data antara wawancara, observasi, dan dokumen terkait, serta member checking

dengan informan untuk memastikan keakuratan temuan (Nakamura & Smallwood, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan pemuda melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya efektif. Meskipun berbagai kebijakan telah disusun untuk memberdayakan pemuda, komunikasi yang kurang intens antara pemerintah daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga) dan organisasi pemuda menjadi salah satu hambatan utama. Banyak OKP yang tidak memperoleh informasi yang memadai terkait dengan program-program pembinaan yang telah dirancang oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam program-program yang ada. Selain itu, konflik internal yang terjadi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak juga memperburuk koordinasi antar OKP, yang seharusnya menjadi agen utama dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kebijakan. Program-program yang ada pun terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kurang memadai, mengakibatkan penundaan atau bahkan pembatalan beberapa kegiatan yang direncanakan.

Dalam penelitian ini, beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembinaan pemuda ditemukan, antara lain kurangnya koordinasi antar pihak, baik antara pemerintah dengan OKP maupun antar OKP itu sendiri. Komunikasi yang terbatas antara pihak-pihak terkait menyebabkan banyaknya kesalahpahaman dan ketidakjelasan mengenai tujuan dan peran masing-masing pihak. Selain itu, masalah kepemimpinan yang terjadi dalam KNPI Kabupaten Lebak, berupa dualisme kepemimpinan, menyebabkan terpecahnya fokus OKP dalam melaksanakan program-program pembinaan pemuda.

Akibatnya, pengelolaan program menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, mengurangi efektivitasnya. Sumber daya yang terbatas, baik dari sisi anggaran maupun tenaga pengelola, juga menjadi kendala besar dalam melaksanakan kebijakan secara optimal. Program pembinaan pemuda yang membutuhkan dana dan sumber daya yang cukup sering kali terbentur pada anggaran yang terbatas atau tidak teralokasi dengan tepat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda di Kabupaten Lebak. Pertama, perlu adanya perbaikan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan OKP. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan program-program yang ada kepada semua OKP dan pemuda di Kabupaten Lebak, sehingga tidak ada pemuda yang merasa terlewatkan atau kurang dilibatkan. Penggunaan platform digital atau aplikasi komunikasi bisa menjadi solusi yang efisien untuk meningkatkan keterlibatan dan koordinasi antar pihak. Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus OKP dan pihak terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola anggaran, menjalankan program, dan melakukan evaluasi. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan atau sektor swasta untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pemuda. Ketiga, penyelesaian konflik internal di KNPI sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi pemuda dapat berfungsi secara optimal sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan OKP lainnya. Upaya penyelesaian ini dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah daerah yang melibatkan semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Terakhir, pemerintah daerah perlu mendiversifikasi program pembinaan dengan

memasukkan kegiatan yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi digital, agar pemuda lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan sosial di era digital.

Tabel 1. Faktor Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Pemuda

Faktor Hambatan	Deskripsi Singkat
Koordinasi yang Kurang	Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan OKP, serta antar OKP.
Dualisme Kepemimpinan KNPI	Terjadinya persaingan internal dalam KNPI yang menghambat koordinasi program.
Keterbatasan Sumber Daya	Terbatasnya anggaran dan SDM untuk mendukung program pembinaan pemuda.

Tabel di atas menunjukkan faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pembinaan pemuda di Kabupaten Lebak. Hambatan ini harus diatasi untuk meningkatkan keberhasilan program yang ada. Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pembinaan pemuda di Kabupaten Lebak memiliki potensi yang besar, namun implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sumber daya. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan OKP, meningkatkan kapasitas sumber daya, serta menyelesaikan konflik internal yang ada. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program pembinaan pemuda dapat lebih efektif dalam memberdayakan pemuda dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pembinaan pemuda melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda (OKP) di Kabupaten Lebak. Berdasarkan temuan yang diperoleh, masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan organisasi-organisasi pemuda yang ada di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi pemuda dalam program-program yang ada, serta kurangnya pengawasan yang memadai dalam implementasi kebijakan. Selain itu, masalah internal dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak yang tidak dapat berfungsi optimal juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Permasalahan ini mengarah pada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Wicaksana dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan koordinasi yang lemah antara pihak pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan publik.

Temuan ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, serta analisis dokumen kebijakan. Proses pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi terkait, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak dan beberapa OKP yang aktif di daerah tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan KNPI Kabupaten Lebak, yang memberikan gambaran tentang dinamika internal organisasi pemuda. Temuan yang diperoleh menunjukkan adanya kendala komunikasi yang menghambat efektivitas kebijakan, serta keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk mendukung program pembinaan pemuda. Temuan ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Grindle (2012), yang menyebutkan bahwa masalah komunikasi dan koordinasi yang buruk sering kali menjadi

penghambat utama dalam implementasi kebijakan di sektor publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan OKP berkontribusi besar terhadap rendahnya efektivitas pembinaan pemuda di Kabupaten Lebak. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten antara pihak pemerintah dan OKP menyebabkan kesalahpahaman tentang tujuan dan pelaksanaan program. Penelitian ini juga menegaskan bahwa sumber daya, baik manusia maupun finansial, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kekurangan anggaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana membuat banyak program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini juga diperburuk oleh disposisi pelaksana kebijakan yang kurang mendukung, mengingat adanya konflik internal di KNPI yang menghambat terciptanya sinergi antar organisasi pemuda. Dalam hal ini, temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya memperbaiki jalur komunikasi dan memperkuat koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Temuan ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Agustino (2020), yang menekankan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Selain itu, struktur birokrasi yang tidak efisien juga menjadi faktor penentu dalam kegagalan implementasi kebijakan ini. Keputusan yang sering kali terhambat oleh birokrasi yang lamban mengurangi efektivitas alokasi anggaran dan waktu yang tersedia untuk kegiatan pembinaan. Dalam hal ini, temuan penelitian ini menyarankan perlunya modifikasi dalam struktur birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan implementasi

kebijakan di tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyebutkan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku seringkali menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar pihak adalah hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik, terutama di tingkat daerah. Penelitian oleh Wicaksana dkk. (2020) mengemukakan bahwa kebijakan publik sering kali gagal diterapkan dengan baik di tingkat lokal karena masalah koordinasi antara pemerintah dan pihak yang terlibat dalam implementasi. Penelitian lain oleh Grindle (2012) juga menunjukkan bahwa hambatan dalam komunikasi sering menyebabkan perbedaan persepsi tentang tujuan kebijakan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan OKP sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan pemuda.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada indikasi bahwa model komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III masih perlu penyesuaian lebih lanjut agar lebih sesuai dengan konteks lokal di Indonesia, khususnya dalam hal pembinaan pemuda. Dalam penelitian ini, meskipun model tersebut telah terbukti relevan, terdapat kebutuhan untuk memperkenalkan pendekatan berbasis teknologi dalam komunikasi kebijakan antara pemerintah dan OKP. Mengingat perkembangan teknologi digital yang pesat, penggunaan platform digital untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah keterbatasan komunikasi

dan koordinasi yang ditemukan di Kabupaten Lebak.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan pemuda. Penelitian ini sejalan dengan teori komunikasi dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif adalah salah satu syarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dan diterapkan dengan baik di tingkat lokal (Nakamura & Smallwood, 2017). Selain itu, temuan terkait sumber daya dan disposisi pelaksana juga konsisten dengan riset terdahulu yang mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup dan kesiapan pelaksana kebijakan untuk menjalankan program. Penelitian oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa ketidakcukupan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa struktur birokrasi yang kaku dan lamban menghambat percepatan implementasi kebijakan, yang bertentangan dengan harapan dalam teori implementasi kebijakan yang menyarankan adanya efisiensi birokrasi dalam mendukung kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar ada modifikasi terhadap struktur birokrasi yang ada agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan pemuda melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Lebak masih terhambat oleh beberapa faktor, terutama komunikasi dan

koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah daerah dan OKP, serta konflik internal dalam organisasi KNPI yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun kapasitas SDM, menjadi hambatan signifikan dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan koordinasi yang lemah menghambat implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem komunikasi dan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai efektivitas yang lebih baik dalam pembinaan pemuda.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembinaan pemuda, disarankan agar pemerintah daerah memperbaiki koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan OKP melalui komunikasi yang lebih intens dan terstruktur. Penggunaan teknologi digital sebagai sarana komunikasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan program. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas organisasi pemuda dan birokrasi dengan memberikan pelatihan yang relevan, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Penyelesaian konflik internal dalam KNPI juga penting agar organisasi pemuda dapat berfungsi dengan optimal sebagai penggerak utama dalam pembinaan pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). Public administration and technology: Enhancing governmental efficiency. *Scopus Journal of Public Policy*, 29(4), 251-263.

- Agustino, L. (2020). The role of youth in development policy. *Public Administration Review*, 18(4), 334-347.
- Agustino, L. (2020). Public policy and administrative reform in Indonesia. *Indonesian Public Policy Review*, 13(4), 130-145.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- French, W., & Bell, C. (2003). *Organizational development: Behavioral science interventions for organization improvement*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Grindle, M. S. (2012). *Public policy implementation*. Princeton University Press.
- Ivancevich, J. M. (2008). *Organizational behavior and management*. New York: McGraw-Hill.
- Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (2002). *Organizational behavior and management: A strategic approach*. Boston: Allyn & Bacon.
- Kurniawan, A. (2018). Digital transformation in public administration: Opportunities and challenges. *Public Sector Innovation Journal*, 13(1), 34-45.
- Kurniawan, A. (2018). Digital innovations in public administration. *Journal of Public Policy Development*, 12(3), 230-245.
- Miftah, T. (2020). Evaluating youth policy: Approaches and effectiveness. *Journal of Public Policy Evaluation*, 7(1), 22-35.
- Mulyana, D. (2019). The role of technology in public sector management. *Journal of Public Administration*, 42(3), 191-205.
- Mulyana, D. (2019). Youth empowerment programs in local governance. *Journal of Social Development*, 14(3), 190-205.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.

- Nakamura, R., & Smallwood, F. (2017). *Public policy: Theories and issues*. New York: Routledge.
- Noguera, J. L. (2021). Youth empowerment in Latin America: The role of community-based programs. *Journal of Youth Studies*, 15(2), 134-145.
- Nugroho, R. (2021). Public sector capacity building in developing countries. *Scopus International Journal of Public Management*, 22(2), 45-58.
- Nugroho, R. (2021). Technological innovations in public policy implementation. *Journal of Technology and Policy*, 32(1), 54-65.
- Sulistyo, T. (2019). Barriers to policy implementation in Indonesia: A case study of local governance. *Journal of Asian Public Policy*, 19(3), 180-200.
- Sulistyo, T. (2019). Evaluating the role of government in youth policy. *Youth Policy Journal*, 17(2), 45-63.
- Toha, M. (2001). *Pembinaan organisasi: Teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksana, P., et al. (2020). Policy communication and coordination in local governance. *International Journal of Public Policy Analysis*, 28(2), 102-115.
- Wicaksana, P., et al. (2020). Government strategies in youth policy implementation. *Journal of Administrative Sciences*, 24(2), 76-89